

– Analisis Isu Terkini –

OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL PROVINSI RIAU SEMESTER I-2022

“Upaya Penguatan Sosial Ekonomi di
Tengah Ketidakpastian Global”



– Analisis Isu Terkini –

OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL PROVINSI RIAU SEMESTER I-2022

**“Upaya Penguatan Sosial Ekonomi di
Tengah Ketidakpastian Global”**



OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL PROVINSI RIAU SEMESTER I-2022
“Upaya Penguatan Sosial Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global”

ISBN: -

No. Publikasi: 14000.2248

Katalog: 3102044.14

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x + 54 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Desain Cover dan Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pencetak:

CV M.N. Grafika

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL PROVINSI RIAU SEMESTER I-2022
“Upaya Penguatan Sosial Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global”

Pengarah:

Misfaruddin

Editor:

Achmad Sobari

Nelaysia Bachtiar

Penulis:

Fitri Hariyanti

Muji Basuki

Bekti Indasari

Layout:

Bekti Indasari

<https://riau.bps.go.id>

KATA PENGANTAR



Publikasi *OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL PROVINSI RIAU SEMESTER I-2022* “Upaya Penguatan Sosial Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global” ini berisi analisis ringkas yang mengkaji kondisi perekonomian dan sosial Riau di tengah situasi sulit perekonomian global yang disebabkan oleh berbagai krisis. Aspek ekonomi yang dianalisis dalam buku ini meliputi Luas Panen dan Produksi Padi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi, Neraca Perdagangan (Ekspor-Import), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan aspek sosial yang dianalisis adalah Kependudukan, Ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Kemiskinan.

Buku ini merupakan salah satu buku dari serial Analisis Isu Terkini BPS Provinsi Riau 2022 yang fokus pembahasannya mengenai keadaan perekonomian dan kondisi sosial Riau di tengah ketidakpastian global. Dengan mengetahui kondisi riil, diharapkan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan keadaan ekonomi dan sosial di tengah ketidakpastian global.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini.

Pekanbaru, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau

Misfaruddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
HIGHLIGHT	3
OVERVIEW	7
LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI.....	7
NILAI TUKAR PETANI (NTP)	8
INFLASI.....	10
EKSPOR-IMPOR.....	11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	13
KEPENDUDUKAN	17
TENAGA KERJA.....	20
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	22
PEMBANGUNAN GENDER.....	24
KEMISKINAN	26
PENJELASAN TEKNIS	33
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Riau (ribu ton), Januari 2021 – Juni 2022	8
Gambar 2.	Perkembangan Luas Panen Padi di Riau (ribu ha), Januari 2021 – Juni 2022	8
Gambar 3.	Nilai Tukar Petani Provinsi Riau (2018=100), Juli 2021 – Juni 2022	9
Gambar 4.	Tingkat Inflasi Bulanan di Provinsi Riau (mtm, %), Juli 2021 – Juni 2022 ..	10
Gambar 5.	Ekspor Impor Riau (miliar US\$), Januari-Juni 2021 dan Januari – Juni 2022	11
Gambar 6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Semesteran Provinsi Riau (persen), 2019-2022	14
Gambar 7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Semesteran Provinsi Riau (<i>y-on-y</i> , %), 2019-2022	14
Gambar 8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), Semester I-2022	15
Gambar 9.	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), Semester I-2022	16
Gambar 10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Komponen Pengeluaran (persen), Semester I-2022	17
Gambar 11.	Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), Semester I-2022.....	17
Gambar 12.	Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau (persen), 1970-2022.....	18
Gambar 13.	Komposisi Penduduk Provinsi Riau, 2022	19
Gambar 14.	Rasio Ketergantungan Provinsi Riau (persen), 1990-2022	19
Gambar 15.	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2022.....	20
Gambar 16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau (persen), 2021 & 2022 (Februari)	21
Gambar 17.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau (persen), 2021 & 2022 (Februari)	22
Gambar 18.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2017-2021 ...	23
Gambar 19.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021	23
Gambar 20.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021	23
Gambar 21.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Riau (Rp 000), 2017-2021	24

Gambar 22. Perkembangan IPM, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG di Provinsi Riau, 2016-2021	25
Gambar 23. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dalam Setahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2016-2021.....	25
Gambar 24. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Riau, 2016-2021.....	25
Gambar 25. Jumlah (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau, 2018 - 2022	27
Gambar 26. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi Riau, Maret 2019 – Maret 2022.....	27
Gambar 27. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Riau, Maret 2019 – Maret 2022.....	28
Gambar 28. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Riau, Maret 2019 – Maret 2022.....	29
Gambar 29. Gini Rasio Menurut Daerah di Provinsi Riau, Maret 2020 – Maret 2022 ..	29

<https://riau.bps.go.id>

Highlight

HIGHLIGHT

- Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Juni 2022 adalah sebanyak 119,51 ribu ton GKG, atau mengalami peningkatan sekitar 108,45 ribu ton (10,20 persen) dibandingkan periode Jan-Juni 2021 yang sebesar 11,06 ribu ton GKG.
- Di semester I-2022, sektor pertanian memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Riau. Selama 6 bulan pertama di tahun 2022, NTP Riau tetap terjaga di atas nilai 100. Secara umum NTP Riau terus mengalami peningkatan dengan puncak NTP tertinggi adalah pada bulan April 2022 yaitu sebesar 159,22.
- Sepanjang semester I-2022, inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau tercatat terjadi inflasi setiap bulannya yang disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas cabe merah karena jumlah produksi di sentra cabe merah mengalami penurunan sehingga pasokan untuk wilayah Riau juga berkurang.
- Neraca perdagangan Riau menunjukkan nilai yang surplus di periode Januari-Juni 2022 dengan penyumbang ekspor terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan sebesar 376,27 persen (yoy).
- Pada semester pertama tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi di Riau mengalami kenaikan sebesar 4,80 persen. Angka ini tercatat sebagai pertumbuhan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka lebih dari 4 persen. Jika dihitung tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Riau mengalami kenaikan lebih tinggi sebesar 5,11 persen.
- Penduduk Riau terus mengalami peningkatan sejak sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2022 hasil proyeksi penduduk interim sebanyak 6,61 juta jiwa.
- Jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Riau periode Februari 2022 mencapai 3,14 juta orang. Sedangkan TPAK Provinsi Riau pada periode Februari 2022 tercatat naik 0,17 poin persen dibandingkan Februari 2021.
- Capaian IPM Riau tahun 2021 berhasil meningkat kembali sebesar 0,23 poin dibandingkan 2020. IPM Riau tahun 2021 tercatat sebesar 72,94 ditenggarai dengan peningkatan semua komponen penyusun IPM.

- Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,21 poin untuk IPM laki-laki dan sebesar 0,37 poin untuk IPM perempuan. Hal ini menyebabkan nilai IPG di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin.
- Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada Maret 2022 turun menjadi 6,78, mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persen jika dibandingkan dengan Maret 2021 (7,12 persen). Hal ini tidak lepas dari pengaruh melandainya kasus positif COVID-19 di seluruh negara di dunia, yang perlahan mulai memulihkan berbagai sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali di Provinsi Riau.

<https://riau.bps.go.id>

Overview

<https://portal.bps.go.id>

OVERVIEW

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI

Memasuki tahun 2022, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan dan dinamika. Setelah hampir dua tahun diterpa pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mulai terlihat geliat pertumbuhannya. Terbukti pada dua kuartal awal tahun 2022 sektor pertanian tumbuh 1,38 persen (*y-on-y*) Triwulan II 2022, meningkat signifikan dari 1,21 persen pada Triwulan I 2022. Sektor pertanian telah menjadi peredam (*cushion*) resesi. Bahkan, dapat menjadi andalan pemulihan ekonomi ke depan (mediaindonesia.com, 20/12/2021).

Berbagai aspek kehidupan masyarakat terkena dampak dari Pandemi COVID-19. Tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga sangat berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Meskipun pandemi berangsur berkurang secara signifikan tetapi belum dapat dikatakan berakhir.

Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), potensi krisis pangan masih akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Menjaga ketahanan pangan di masa pemulihan akibat pandemi adalah suatu

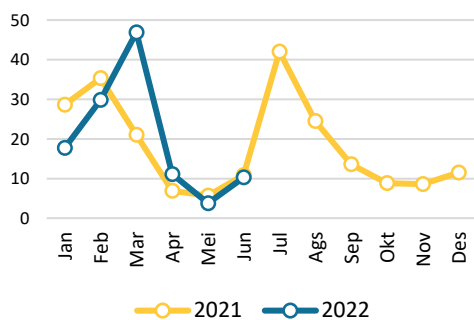
keharusan dan menjadi satu program prioritas pemerintah Indonesia.

Pangan identik dengan beras, ini disebabkan karena hampir semua atau sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Oleh karena itu ketahanan pangan bagi Indonesia berkaitan erat dengan kecukupan penyediaan beras.

Padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi Indonesia, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani. Tetapi tidak untuk Riau. Salah satu sumber penghasilan utama masyarakat Riau berada pada subsektor perkebunan, karena hampir 33 persen masyarakatnya bekerja pada lapangan usaha ini.

Riau merupakan salah satu daerah yang mengalami kerentanan pangan. Sebagai gambaran, untuk memenuhi kebutuhan beras yang mencapai 571 ribu ton per tahunnya, Riau hanya sanggup memproduksi beras 139 ribu ton per tahun. Lebih kurang 65 persen kebutuhan beras daerah ini didatangkan dari luar daerah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara (gatra.com, 15/11/2021).

Selain berupaya meningkatkan produksi sendiri, Pemerintah Provinsi Riau juga terus berusaha meningkatkan kerjasama dengan daerah pemasok dengan membangun dan memperbaiki akses infrastruktur ke daerah sentra pangan di luar provinsi Riau.

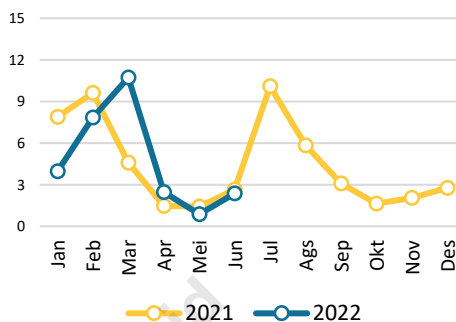


Gambar 1. Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Riau (ribu ton), Januari 2021 - Juni 2022

Walaupun tidak menjadi sumber penghasilan utama, tetapi Riau tetap berupaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Juni 2022 adalah sebanyak 119,51 ribu ton GKG. Mengalami peningkatan 11,06 ribu ton GKG atau sebesar 10,20 persen dibandingkan produksi pada periode Jan-Juni 2021 yang sebesar 108,45 ribu ton. Peningkatan produksi terjadi karena terjadi peningkatan luas panen pada *subround* tiga yang disebabkan adanya percepatan tanam.

Produksi padi tertinggi terjadi pada masa puncak panen padi di bulan Maret 2022 yaitu sebesar 46,89 ribu ton GKG. Sedangkan pada tahun periode Jan-Juni

2021, puncak panen padi terjadi pada bulan Februari 2021 dengan jumlah produksi padi sebesar 35,33 ribu ton GKG.



Gambar 2. Perkembangan Luas Panen Padi di Riau (ribu ha), Januari 2021 - Juni 2022

Sepanjang Januari hingga Juni 2022, realisasi panen padi sebesar 28,23 ribu hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,61 ribu hektare (2,21 persen) dibandingkan periode Januari hingga Juni 2021 yang sebesar 27,62 ribu hektar. Luas panen tertinggi pada Semester I 2022 terjadi pada Maret, yaitu sebesar 10,72 ribu hektare, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 0,87 ribu hektare.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Selama dua tahun terakhir pandemi COVID-19 telah menggoyahkan perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tidak sedikit sektor dunia

usaha yang terpuruk. Tetapi ditengah kemerosotan ekonomi di seluruh negara, terdapat satu sektor yang masih bisa bertahan yaitu sektor pertanian. Sektor ini menjadi bantalan atau peredam karena masih bisa tumbuh 1,84 persen secara nasional.

Di Semester I 2022, lapangan usaha pertanian tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Riau. Pertanian berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana selama triwulan I dan II 2022 tumbuh 0,11 persen dan 2,45 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan karena subsektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan. Sementara untuk perkebunan dan kehutanan masih tumbuh lebih baik.

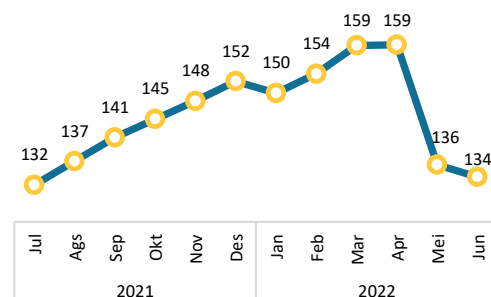
Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Riau di Semester I tahun 2022 mencapai 25,09 persen, menduduki peringkat kedua setelah lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki peranan 26,86 persen.

Tidak hanya dalam PDRB yang mengalami pertumbuhan positif, tapi juga mengalami peningkatan dalam ekspor. Selama rentang waktu Januari-Juni 2022, ekspor nonmigas dari industri pengolahan hasil pertanian yang didominasi oleh lemak & minyak

hewan/nabati (CPO dan turunannya) mencapai USD 5,30 miliar atau sebesar 55,65 persen dari total nilai ekspor non migas Riau yang mencapai USD 9,53 miliar.

Bertahannya sektor ini di saat pandemi berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi nilai NTP, semakin baik daya beli petani terhadap pemenuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, dan berarti tingkat kehidupan petani relatif lebih sejahtera.

Sepanjang Semester I tahun 2022, NTP Riau tetap terjaga di atas nilai 100. Mulai dari Januari sampai April 2022 nilai NTP terus mengalami kenaikan tetapi menurun pada bulan Mei dan Juni. Puncak NTP tertinggi adalah pada bulan April 2022 yaitu sebesar 159,22. Tingginya NTP lebih disebabkan karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan yang sangat signifikan akibat dari naiknya harga pada komoditas perkebunan kelapa sawit.



Gambar 3. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau (2018=100), Juli 2021 - Juni 2022

Selain itu, meskipun ekonomi dunia dalam taraf pemulihan akibat terdampak COVID-19 tetapi hal ini tidak menyurutkan permintaan hasil olahan kelapa sawit (*Crude Palm Oil* atau CPO). Permintaan CPO dari negara-negara pengimpor tetap tinggi meskipun sempat terjadi penurunan permintaan tetapi tidak signifikan. Permintaan dalam negeri akan CPO sebagai bahan dasar biodiesel sebagai akibat dari program pemerintah B30, menjadikan permintaan CPO tetap tinggi.

INFLASI

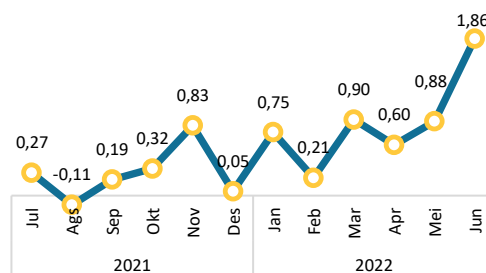
Salah satu indikator makro ekonomi pembangunan suatu wilayah adalah inflasi. Sepanjang Semester 1 tahun 2022, inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau tercatat terjadi inflasi setiap bulannya. Inflasi terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 0,21 persen, sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 1,86 persen.

Tingginya inflasi pada bulan Juni 2022 disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas cabe merah hingga mencapai harga Rp. 120.000,- per kg. Berdasarkan fenomena yang ada, tingginya harga cabe merah khususnya wilayah Riau disebabkan karena jumlah produksi di sentra cabe merah seperti

Sumatera Barat dan Sumatera Utara mengalami penurunan sehingga pasokan untuk wilayah Riau juga berkurang.

Selain itu, dengan diberlakukannya uji coba pembatasan BBM di beberapa wilayah termasuk Sumatera Barat, menyebabkan terganggunya jalur distribusi sehingga harga cabe merah meningkat tajam.

Inflasi yang tinggi karena disebabkan komoditas cabe merah menunjukkan kondisi dimana Riau memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan dari luar daerah terutama komoditas yang termasuk komponen bergejolak (*volatile*). Tidak hanya komoditas cabe merah tetapi juga komoditas lainnya seperti cabe, beras, telur ayam ras, dan bawang merah. Ketergantungan ini harus segera dikurangi supaya inflasi tetap dapat terkendali.



Gambar 4. Tingkat Inflasi Bulanan di Provinsi Riau (mtm, %), Juli 2021 - Juni 2022

Aktifitas ekonomi masyarakat selama Triwulan II 2022 tetap berlangsung meskipun inflasi terbilang

tinggi. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II terdapat bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga meskipun terjadi kenaikan harga tetapi masyarakat tetap melakukan pembelian atau mengkonsumsi karena kebutuhan.

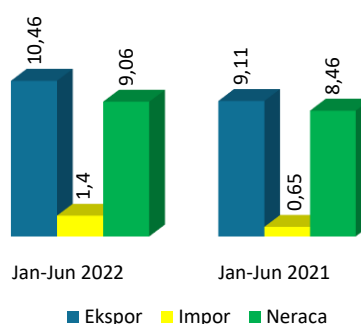
Terjadinya inflasi selama Semester I 2022 terutama pada Triwulan II 2022 juga tidak terlalu mengganggu kondisi perekonomian makro Provinsi Riau. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap tingginya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2022 yaitu sebesar 4,88 persen. Hal ini disebabkan karena ekonomi Riau ditopang oleh 3 sektor utama yaitu Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dimana ke tiga sektor tersebut tidak terdampak dengan inflasi yang disebabkan karena komoditas cabai merah.

EKSPOR-IMPOR

Menurut Ranga D Yofa dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, krisis kesehatan telah berimbas pada krisis ekonomi. Kegiatan ekonomi dan industri terhambat dan berdampak negatif terhadap kegiatan ekspor dan impor. Akan tetapi untuk Provinsi Riau, neraca perdagangan Provinsi Riau menunjukkan nilai yang surplus pada

periode Januari-Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ekspor yang lebih signifikan dibandingkan peningkatan impor. BPS mencatat nilai ekspor Provinsi Riau pada periode Januari-Juni 2022 tercatat USD 10,46 miliar, sementara impor tercatat sebesar USD 1,40 miliar sehingga neraca perdagangan menunjukkan surplus USD 9,06 miliar. Nilai surplus periode Januari-Juni 2022 ini terutama yang terbesar terjadi pada bulan April 2022, dimana terjadi surplus sebesar US\$ 1,86 miliar. Sedangkan surplus terendah terjadi pada bulan Mei 2022 sebesar US\$ 840,93 juta.

Chief Economist Institut Harkat Negeri yaitu Awalil Rizky menyatakan bahwa surplus neraca perdagangan sebagai hasil dari nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi sebuah bangsa.



Gambar 5. Ekspor Impor Riau (miliar US\$), Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022

Penyumbang ekspor terbesar pada periode Januari-Juni 2022 yaitu sektor

industri yang mengalami peningkatan sebesar 376,27 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (*c-to-c*). Di sisi lain, ekspor sektor migas mengalami kontraksi sebesar -15,51 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (*c-to-c*). Peningkatan ekspor pada sektor industri pengolahan disebabkan oleh meningkatnya permintaan luar negeri terhadap produk CPO dan turunannya.

Adapun pangsa tujuan ekspor masih didominasi Tiongkok (16,04 persen), disusul India (10,40 persen), diikuti Malaysia (8,93 persen), dan Belanda (7,81 persen). Secara umum, kinerja ekspor Riau di tengah menurunnya kasus pandemi ini meningkat 14,80 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (*ctoc*), dimana pada periode Januari-Juni 2021 nilai ekspor sebesar US\$ 9,11 miliar, sedangkan pada periode Januari-Juni 2022 sebesar US\$ 10,46 miliar.

Dibandingkan ekspor, impor di periode Januari-Juni 2022 tumbuh lebih tinggi secara positif sebesar 118,19 persen (*c-to-c*). Sekalipun dari segi pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, tapi secara nilai impor tetap masih jauh dibawah nilai ekspor, sehingga mengakibatkan terjadinya surplus neraca perdagangan pada periode Januari-Juni 2022.

Peningkatan kinerja impor ini ikut mempengaruhi pertumbuhan sektor

industri pengolahan, dimana hal itu terlihat dari sepuluh golongan barang impor nonmigas. Dari sepuluh golongan impor nonmigas tersebut, impor terbesar terjadi pada golongan barang mesin-mesin yang banyak dipakai oleh sektor industri pengolahan, dengan nilai impor sebesar US\$ 509 juta.

Apabila dilihat menurut golongan penggunaan barang, komoditas barang konsumsi memang mengalami peningkatan pada periode Januari-Juni 2022 ini, dimana terjadi kenaikan *c-to-c* sebesar 91,70 persen. Sekalipun perannya dalam impor Riau relatif kurang signifikan karena hanya menyumbang 2,64 dari total impor, akan tetapi fenomena peningkatan impor barang konsumsi dapat menunjukkan belum optimalnya program peningkatan konsumsi barang produksi dalam negeri, di tengah penurunan permintaan domestik akibat pandemi. Namun juga, ada kemungkinan ini adalah sinyal bahwa masyarakat kelas menengah ke atas mulai mengeluarkan uangnya untuk belanja.

Adapun kontribusi impor terbesar berasal dari komoditas bahan baku/penolong, yaitu menyumbang sebesar 89,74 persen dari total impor. Pada periode Januari-Juni 2022, impor bahan baku/penolong tumbuh signifikan sebesar 129,39 persen. Peningkatan

impor bahan baku/penolong menunjukkan kapasitas produksi yang membaik. Hal ini merefleksikan permintaan barang sudah mulai meningkat. Negara pemasok barang impor nonmigas masih didominasi Tiongkok (34,19 persen), diikuti Kanada (16,32 persen) dan Finlandia (8,94 persen).

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

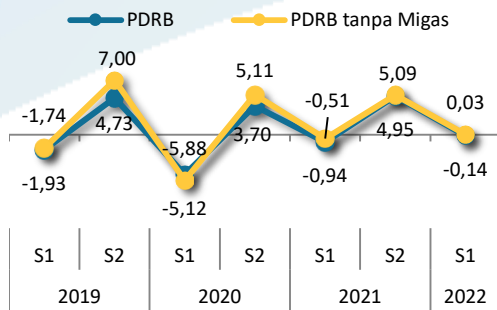
Upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam pengendalian pandemi COVID-19 telah membuahkan hasil. Angka kasus terkonfirmasi COVID-19 kian hari semakin menurun. Hal ini berhasil meningkatkan keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas sehingga mendorong pemulihan perekonomian Indonesia, termasuk Riau.

Namun demikian, di awal tahun 2022 dunia dikejutkan dengan adanya invasi Rusia terhadap Ukraina. Hal tersebut berimbas terhadap kinerja perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Kenaikan harga beberapa komoditas yang diakibatkan oleh konflik tersebut membuat pertumbuhan ekonomi global tertahan. Minyak bumi dan industri pengolahan pertambangan merupakan komoditas yang kenaikan harganya dapat meningkatkan inflasi

global. Akibatnya, menimbulkan potensi gangguan pasar finansial sehingga menghambat pemulihan ekonomi.

Hambatan yang timbul akibat konflik Rusia-Ukraina tersebut turut dirasakan Indonesia, termasuk Riau. Meski demikian, kinerja ekonomi Riau masih menunjukkan perbaikan. Jika ditinjau secara semesteran, pertumbuhan ekonomi Riau membentuk pola musiman. Semester II selalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan semester I.

Laju pertumbuhan ekonomi Riau pada semester I-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,14 persen jika dibandingkan semester II-2021. Angka tersebut menunjukkan arah perbaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana perekonomian Riau terkontraksi lebih dalam sebesar 0,94 persen. Jika dibandingkan dengan semester sebelumnya, perekonomian Riau secara semesteran menunjukkan penurunan. Akan tetapi, secara tahunan ekonomi Riau pada semester I-2022 cukup mengalami kenaikan signifikan.

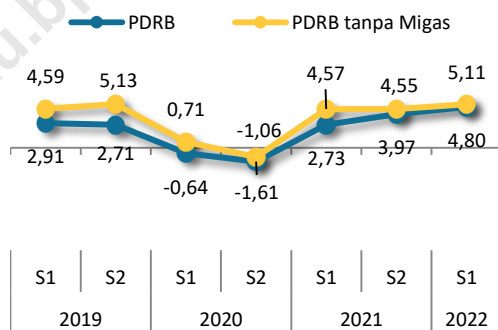


Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Semesteran Provinsi Riau (persen), 2019-2022

Ekspor nonmigas Riau pada semester I-2022 tercatat mengalami peningkatan di beberapa sektor unggulan. Peningkatan ini memberikan sumbangan terhadap perekonomian Riau untuk tumbuh lebih baik. Faktor lain yang menjadi sentimen positif meningkatnya perekonomian Riau adalah pelanggaran mobilitas masyarakat. Masyarakat sudah beraktivitas seperti kondisi normal (sebelum pandemi COVID-19), meskipun masih harus tetap memperhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah. Pergerakan masyarakat di beberapa tempat umum yang terekam oleh *Google Mobility Report* tercatat meningkat signifikan jika dibandingkan dengan semester I-2021.

Jika dibandingkan dengan semester sebelumnya, perekonomian Riau secara semesteran menunjukkan penurunan. Akan tetapi, secara tahunan ekonomi Riau pada semester I-2022 naik sebesar 4,80 persen. Angka tersebut sedikit

lebih baik dibandingkan tahun 2021, dimana pertumbuhan ekonomi Riau pada semester I dan II masih belum bisa menyentuh angka 4 persen. Jika tanpa memperhitungkan sektor Migas, pertumbuhan ekonomi Riau semester I-2022 mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 5,11 persen. Meskipun mulai terjadi aktivitas pengeboran dan pengembangan sumur minyak mentah baru di Blok Rokan, namun penurunan produksi minyak mentah akibat *natural declining* masih menahan laju pertumbuhan ekonomi Riau.



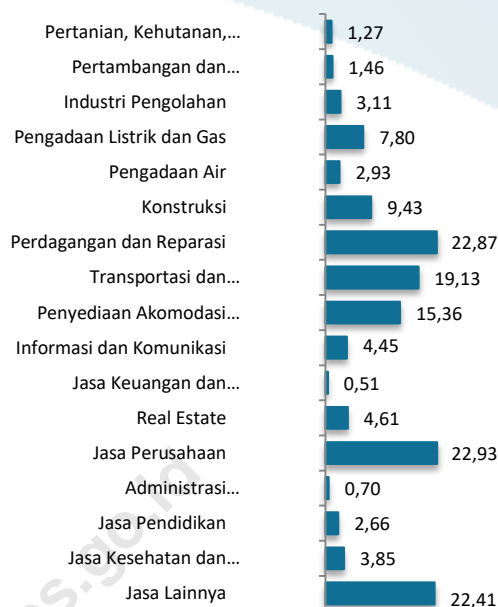
Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Semesteran Provinsi Riau (*y-on-y, %*), 2019-2022

Nilai PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku pada semester I-2022 mencapai 488,77 triliun rupiah. Secara nominal, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 88,26 triliun rupiah dibandingkan semester I-2021 yang nilainya sebesar 400,50 triliun rupiah. Begitupun jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga

mengalami kenaikan dari 247,11 triliun rupiah menjadi 258,97 triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada semester I-2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan semester I-2021. Hal ini dikarenakan meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Sedangkan kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku selain dipengaruhi oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada beberapa lapangan usaha, juga salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, khususnya minyak mentah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harga minyak “mendidih” adalah adanya kesepakatan OPEC dan sekutunya (OPEC+) untuk mengurangi produksi minyak sebesar 100 ribu barel per hari. Selain itu, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan pasokan minyak ke pasar global berkurang. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada melesatnya harga minyak mentah Indonesia, termasuk di Riau, sebagai salah satu komoditas utama dalam ekonomi Riau..



Gambar 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), Semester I-2022

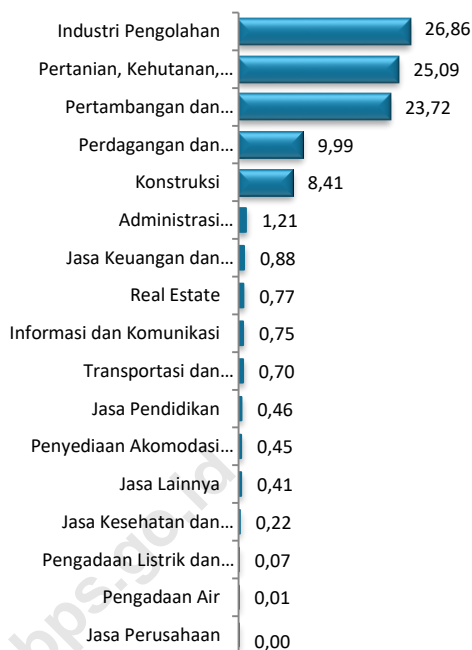
Sepanjang semester I-2022, semua kategori lapangan usaha tumbuh positif. Bahkan, untuk kategori Pertambangan dan Penggalian yang beberapa tahun terakhir mengalami kontraksi, pada semester I-2022 menunjukkan kinerja positif. Kenaikan tersebut diakibatkan meningkatnya produksi batubara yang mulai menggeliat sejak awal tahun karena adanya peningkatan permintaan batubara global.

Kategori Jasa Perusahaan tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 22,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pembukaan kembali izin umroh ke Tanah Suci Mekah yang dimulai pada 8 Januari

2022. Selain itu, kegiatan MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*) menggeliat sangat signifikan karena telah ditiadakannya PPKM serta mulai banyak pengadaan *Event Organizer* (EO) penyelenggaraan konser di semester ini.

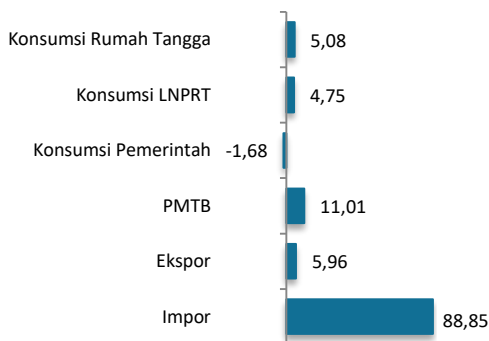
Disusul oleh Perdagangan dan Reparasai yang tumbuh sebesar 22,87 persen. Kenaikan tersebut dipicu karena adanya peningkatan pembelian kendaraan bermotor yang cukup tinggi diakibatkan adanya kenaikan harga komoditas kelapa sawit di tingkat petani. Perdagangan besar dan eceran lainnya juga mengalami peningkatan aktivitas yang terekam dari analisis *google mobility* di area pasar yang disebabkan daya beli masyarakat yang membaik.

Selanjutnya, Jasa Lainnya juga meningkat sebesar 22,41 persen. Tingginya pengunjung tempat wisata pada semester ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan seiring tidak adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Pada semester ini juga mulai dibuka kembali Pelabuhan Internasional Dumai sehingga kunjungan turis asing yang melancong ke Riau meningkat. Selain itu, beberapa *event* nasional yang sempat vakum, pada tahun ini digelar kembali.



Gambar 9. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), Semester I-2022

Besarnya ketergantungan Provinsi Riau terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha digambarkan melalui struktur ekonomi. Sepanjang semester I-2022, struktur perekonomian Riau didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan dan Reparasi; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau.



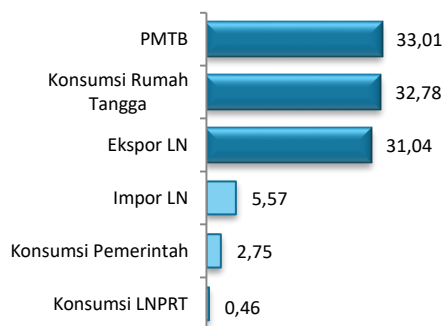
Gambar 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Komponen Pengeluaran (persen), Semester I-2022

Ditinjau dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mengalami peningkatan. Impor Luar Negeri merupakan komponen dengan pertumbuhan paling tinggi sebesar 88,85 persen. Pertumbuhan ini dipicu akibat meningkatnya impor pada beberapa komoditas yaitu garam, belerang, kapur; bahan bakar mineral; bahan kimia; bahan kimia organik dan anorganik; pupuk; perekat, enzim; kayu, barang dari kayu; dan kertas/karton. Sementara kenaikan impor untuk barang modal terjadi pada komoditas mesin/pesawat mekanik.

Sedangkan, komponen Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 1,68 persen. Hal ini dikarenakan adanya penurunan realisasi belanja yang cukup signifikan pada belanja pegawai baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, terutama belanja pegawai pada sector kesehatan seiring turunnya kasus COVID-19. Penurunan juga disebabkan

karena realisasi belanja gaji ke-13 tahun ini tercatat di semester II sementara tahun lalu tercatat di semester I. Selain itu, realisasi belanja bansos menurun sejalan berkurangnya kasus COVID-19.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen pengeluaran yang dominan dalam perekonomian Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 33,01 persen. Selanjutnya disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 32,78 persen. Di sisi lain, Ekspor Luar Negeri memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian Riau juga, yaitu 31,04 persen.



Gambar 11. Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), Semester I-2022

KEPENDUDUKAN

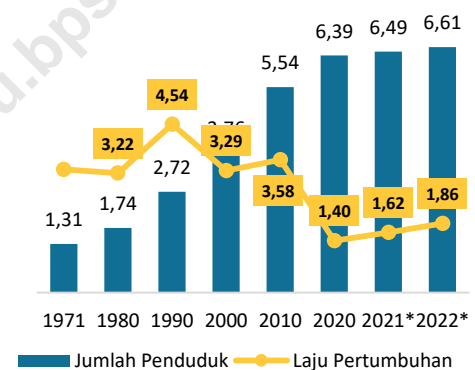
Tahun 2022 merupakan salah satu tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk. Data kependudukan yang diperoleh pada tahun 2022 berasal dari

hasil proyeksi penduduk, dimana perhitungan ilmiahnya didasarkan pada asumsi dari beberapa komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Berdasarkan hasil proyeksi interim penduduk Indonesia 2021–2023 tercatat jumlah penduduk Provinsi Riau pada pertengahan tahun 2022 sebanyak 6,61 juta jiwa. Angka ini terus mengalami peningkatan sejak sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021, terlihat adanya peningkatan sebanyak 120,78 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau selama periode 1971 hingga 2010 berada di atas 3 persen dengan rata-rata 3,57 per tahun. Sedangkan pada periode 2010 hingga 2020 sedikit mengalami perlambatan. Pada dekade terakhir ini, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau hanya sebesar 1,40 persen per tahun. Angka tersebut melambat 2,18 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010. Kendati demikian, laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat berturut-turut menjadi 2,08 persen dan 1,86 persen.

Fenomena menarik yang ditemukan pada periode 2000-2010 adalah Riau merupakan provinsi di luar Pulau Jawa

yang menjadi penerima migran terbesar. Adanya pembukaan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit secara massif, akibat permintaan komoditas yang meningkat pesat, menjadi penyebab meningkatnya daya tarik migrasi penduduk ke Provinsi Riau. Selain itu, tersedianya lowongan pekerjaan dari berbagai sektor ekonomi lainnya antara lain lapangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan industri pengolahan, menjadikan Riau menjadi tujuan para pencari kerja dari luar Provinsi Riau.



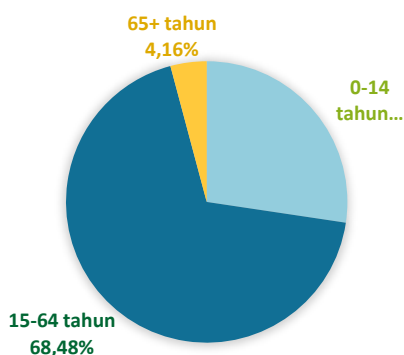
Keterangan: *) Hasil Proyeksi Penduduk Interim

Gambar 12. Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau (persen), 1971-2022

Jika diperhatikan pada periode 2010-2020, pola migrasi penduduk ke Provinsi Riau mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini didukung dengan fenomena penutupan dan pengalihan lokasi beberapa perusahaan besar, seperti rencana alih

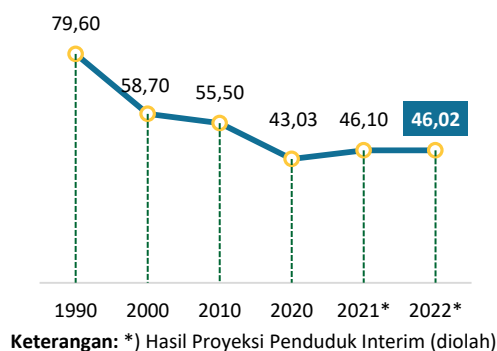
operasi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. Dalam kurun waktu tersebut, perusahaan minyak ini dikabarkan telah melakukan efisiensi dengan cara perampingan jumlah karyawan maupun pemutusan hubungan kerja dengan para perusahaan subkontraktornya. Kebijakan tersebut membuat ribuan karyawan perusahaan yang terkait dengan Chevron terkena dampaknya dan kembali ke daerah asal masing-masing.

Ditinjau dari sisi usia, komposisi penduduk menjadi suatu hal yang penting. Komposisi penduduk usia produktif (14-64 tahun) yang sangat besar merupakan salah satu modal pembangunan di Provinsi Riau. Jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Riau tahun 2022 tercatat sebanyak 4,53 juta jiwa dengan proporsi sebesar 68,48 persen. Sedangkan untuk proporsi usia non-produktif sebesar 27,36 persen (usia 0-14 tahun) dan 4,16 persen (usia 65 tahun ke atas).



Gambar 13. Komposisi Penduduk Provinsi Riau, 2022

Perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) digambarkan oleh rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan di Riau pada tahun 1990 mencapai 79,60 persen dan menurun menjadi 43,03 persen pada tahun 2020. Angka ini mengalami tren menurun, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 46,02 persen. Artinya dari 100 orang penduduk produktif menanggung secara ekonomi 46 orang usia nonproduktif. Penurunan rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

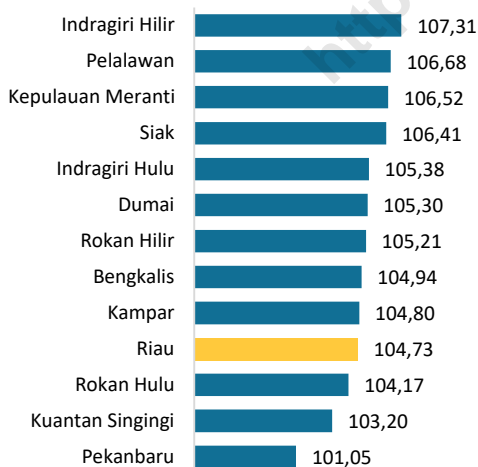


Gambar 14. Rasio Ketergantungan Provinsi Riau (persen), 1990-2022

Berdasarkan keterbandingan jenis kelamin, pada tahun 2022 proporsi penduduk laki-laki di Provinsi Riau

sebesar 51,16 persen atau sebanyak 3,38 juta jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Riau sebanyak 3,23 juta orang atau 48,84 persen dari penduduk Provinsi Riau. Dari kedua informasi tersebut menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Provinsi Riau sebesar 105. Hal ini berarti terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan di Provinsi Riau. Rasio jenis kelamin akan lebih bervariasi jika ditinjau menurut kelompok usia.

Rasio jenis kelamin di level Provinsi Riau sejalan dengan level nasional, dimana penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini juga berlaku sama untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.



Gambar 15. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2022

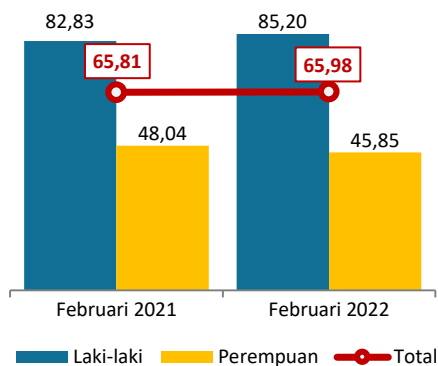
Provinsi Riau memiliki luas daratan sebesar 87,02 ribu kilometer persegi,

dengan jumlah penduduk sebanyak 6,61 juta jiwa maka kepadatan penduduk Provinsi Riau di tahun 2022 sekitar 76 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kota Pekanbaru menjadi wilayah terpadat di Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki luas geografi terkecil atau sebesar 0,73 persen wilayah Provinsi Riau, namun dihuni oleh 1,01 juta jiwa atau 15,23 persen penduduk Provinsi Riau. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai sebaran penduduk di bawah 5 persen penduduk Provinsi Riau.

TENAGA KERJA

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan secara semesteran, penduduk yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Riau periode Februari 2022 mencapai 3,14 juta orang. Sedangkan pada periode Februari 2021 jumlah angkatan kerja Provinsi Riau sebanyak 3,27 juta orang. Untuk mengetahui ukuran keaktifan penduduk usia kerja dapat dilihat dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



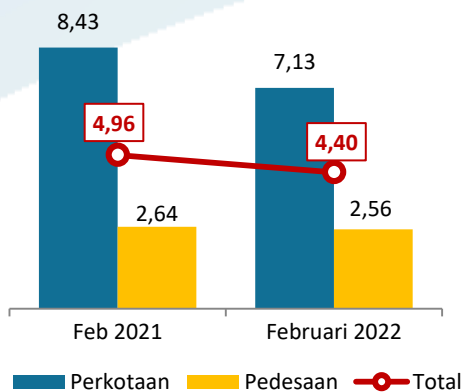
Gambar 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau (persen), 2021 & 2022 (Februari)

TPAK Provinsi Riau pada Februari 2022 tercatat sebesar 65,98 persen, naik sebesar 0,17 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2021 yang besarnya 65,81 persen. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan pada kedua periode. TPAK laki-laki berada di kisaran 82 persen ke atas, sedangkan TPAK perempuan berada di rentang 46 hingga 48 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan perempuan.

Jika ditelusuri lebih jauh, pada periode Februari 2022 terlihat bahwa TPAK laki-laki mengalami kenaikan. Hal tersebut diduga akibat mulai pulihnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak dari menurunnya kasus positif COVID-19. Berbanding terbalik dengan TPAK laki-

laki, angka TPAK perempuan mengalami penurunan 2,19 persen poin. Jumlah penurunan partisipasi kerja perempuan adalah untuk lebih fokus dalam urusan rumah tangga, di tengah pendapatan kaum laki-laki sebagai kepala keluarga mengalami kenaikan sebagai dampak menggeliatnya perekonomian seiring menurunnya kasus positif COVID-19.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Provinsi Riau pada Maret 2022 mengalami penurunan menjadi 4,40 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Riau, terdapat 4 orang yang masuk kategori pengangguran. Jika ditelusuri lebih jauh, baik daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan TPT pada periode Maret 2022. Penurunan ini dipicu akibat mulai menggeliatnya perekonomian Provinsi Riau sebagai dampak menurunnya kasus positif COVID-19.



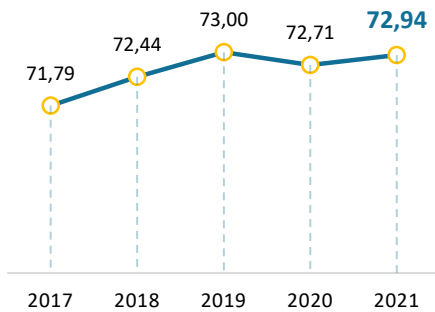
Gambar 17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau (persen), 2021 & 2022 (Februari)

Jika ditinjau lebih jauh, penurunan TPT pada periode Maret 2022 di perkotaan menyentuh angka diatas 1 persen poin, begitu juga halnya penurunan TPT yang terjadi di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus COVID-19 pada tahun 2022 dibanding tahun 2021, sehingga aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak baik di perkotaan maupun pedesaan. Sedangkan di daerah pedesaan kategori pertanian lebih mendominasi lapangan usaha. Sepanjang semester 1 tahun 2022, pertanian perkebunan merupakan lapangan usaha yang justru mengalami pertumbuhan positif disebabkan kebaikan harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit akibat permintaan CPO yang meningkat di pasar global.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga tahun 2019, IPM Riau menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah membalikkan tren pembangunan manusia untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Hal ini ditenggarai adanya penurunan pengeluaran per kapita yang diselesaikan.

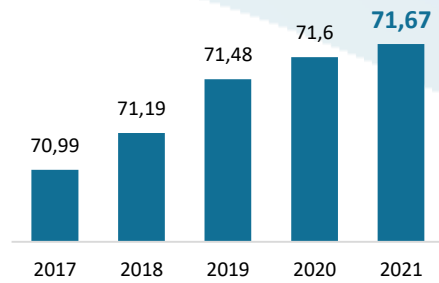
Pada tahun 2021, capaian IPM Riau berhasil meningkat kembali sebesar 0,23 poin dibandingkan 2020. Hal tersebut ditenggarai dengan peningkatan semua komponen penyusun IPM. Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu faktor yang mendukung kenaikan IPM adalah terjadinya perbaikan kinerja ekonomi Riau yang berdampak positif terhadap komponen pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. IPM Riau tahun 2021 tercatat sebesar 72,94 atau naik 0,23 poin (0,32 persen) dibanding tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2017-2021 sebesar 0,40 persen per tahun.



Gambar 18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2017-2021

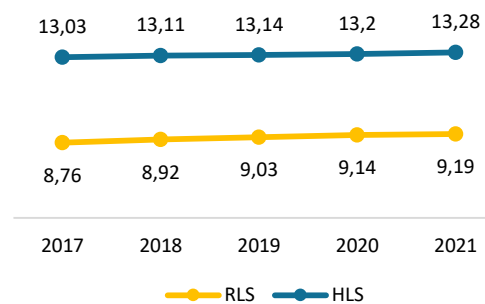
Torehan posisi IPM Riau di tingkat Nasional pada tahun 2021 berada pada peringkat 7 dari 34 provinsi serta peringkat 2 dari 10 provinsi di Sumatera. Kendati demikian, angka tersebut masih belum mampu mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan, yakni sebesar 73,13. Di sisi lain, capaian IPM Riau 2021 juga masih berada di bawah kondisi IPM tahun 2019 sebesar 73,00.

Ditinjau dari dimensi dasar yang membentuk IPM, ketiganya mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pertama, Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, Riau telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,68 tahun atau tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun.



Gambar 19. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021

Pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan representasi dari dimensi pengetahuan. Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,48 persen per tahun. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Riau telah mencapai 13,28 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan mereka hingga jenjang Diploma II (tidak tamat).



Gambar 20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021

Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Riau tumbuh 1,21 persen per tahun

selama periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021 Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Riau usia 25 tahun ke atas mencapai 9,19 tahun, atau telah menduduki jenjang pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I) namun tidak selesai.

Menurut UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), secara global para siswa mengalami kurangnya aset rumah tangga yang diperlukan untuk menerima layanan pembelajaran digital. Hal ini terutama dialami oleh anak perempuan, tinggal di perdesaan dan merupakan keluarga miskin. Sehingga untuk mengurangi dampak lebih lanjut dari pandemi ini, kualitas pendidikan juga patut mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Sedangkan pada dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012), pada tahun 2021 pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Riau mencapai Rp 10,74 juta per tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,57 persen. Setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran per kapita penduduk Riau mulai mengalami perbaikan dan kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



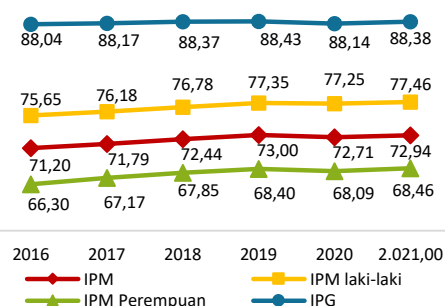
Gambar 21. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Riau (Rp 000), 2017-2021

Peningkatan pengeluaran per kapita secara tidak langsung menggambarkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Provinsi Riau. Naiknya pendapatan diakibatkan membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

PEMBANGUNAN GENDER

Upaya pemerintah untuk memulihkan segala aspek kehidupan akibat pandemi COVID-19 telah membuahkan hasil, salah satunya meningkatnya kualitas hidup manusia. Terlihat dari kenaikan nilai IPM baik laki-laki maupun perempuan. Kenaikan terjadi sebesar 0,21 poin untuk IPM laki-laki dan sebesar 0,37 poin untuk IPM perempuan. Hal ini menyebabkan nilai

IPG di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin.

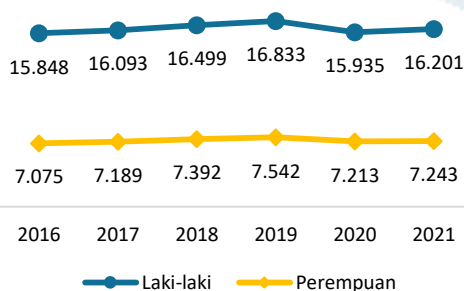


Gambar 22. Perkembangan IPM, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG di Provinsi Riau, 2016-2021

Dalam laporan Kesenjangan Gender Global 21 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia pada akhir Maret 2021 menyebutkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 kian memperlebar kesenjangan gender. Kemajuan menuju kesetaraan gender terhenti di beberapa sektor-sektor yang terpuak akibat pembatasan sosial. Akan tetapi, pada tahun 2021 kondisi ini kian membaik seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19.

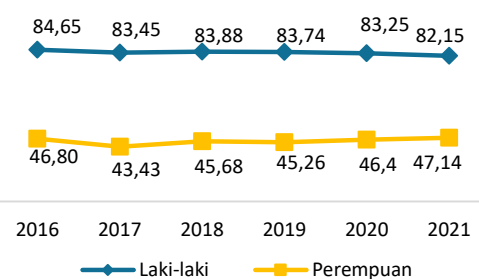
Pada tahun 2021, rata-rata pendapatan perempuan yang didekati melalui pengeluaran jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki di Riau. Jika rata-rata pendapatan laki-laki sudah mencapai 16,20 juta rupiah, maka perempuan hanya sekitar 7,24 juta rupiah. Peningkatan pengeluaran perkapita laki-laki sebesar sebesar 0,27 juta, sedangkan perempuan terjadi

peningkatan pengeluaran perkapita sebesar 0,30 juta.



Gambar 23. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dalam Setahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2016-2021

Pelonggaran mobilitas masyarakat yang telah diterapkan sepanjang tahun 2021 membawa dampak terhadap kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pengeluaran masyarakat. Berbeda dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2021, TPAK laki-laki masih mengalami penurunan sementara TPAK perempuan mengalami peningkatan. Perbedaan ini disebabkan karena selama masa pandemi banyak perempuan yang membantu bekerja.



Gambar 24. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Riau, 2016-2021

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antarjenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank*, 2017).

Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat baik ekonomi dan sosial. Imbas dari PSBB adalah terjadinya penurunan tingkat pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan.

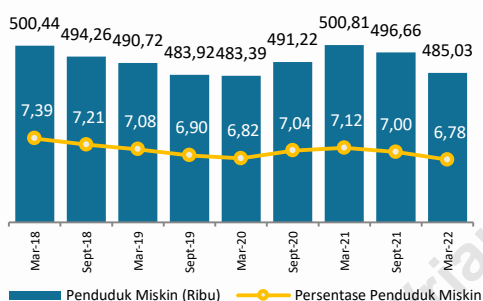
Mengutip dari laman resminya (11/06/2020), Bank Dunia mendorong agar negara-negara di dunia untuk membuat terobosan kebijakan ekonomi dalam rangka mengatasi ancaman kemiskinan ekstrem. Akibat pandemi virus COVID-19, Bank Dunia mengkhawatirkan akan ada 71 juta penduduk dunia yang jatuh kepeada kemiskinan ekstrem. Kenaikan angka kemiskinan ekstrem ini tercatat menjadi yang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau dua dekade terakhir.

Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan kemiskinan

pada masa pandemi COVID-19. Secara umum, pada periode Maret 2018-Maret 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun terdapat kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2020 dan Maret 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin saat itu dipicu oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan mobilitas manusia dibatasi dan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian global. Selanjutnya, mulai September 2021 sampai dengan Maret 2022 penduduk dan persentase penduduk miskin di Riau terus menurun. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Riau pada September 2021 dan Maret 2022 tidak lepas dari pengaruh melandainya kasus positif COVID-19 di seluruh negara di dunia, yang perlahan mulai memulihkan berbagai sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Pelonggaran kegiatan ekonomi terutama yang terkait dengan pergerakan orang menyebabkan peningkatan pada kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini berdampak positif pada penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2021 dan Maret 2022.

Persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis

Kemiskinan) di Provinsi Riau pada September 2021 sebesar 7,00 persen, mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2021 (7,12 persen). Bahkan pada Maret 2022 kembali terjadi penurunan persentase penduduk miskin 0,22 poin, dimana pada September 2021 ada 7,00 persen penduduk miskin, menjadi 6,78 persen pada Maret 2022.



Gambar 25. Jumlah (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau, 2018 - 2022

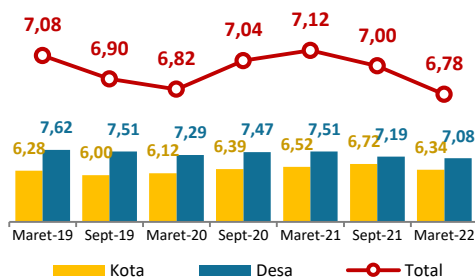
Penurunan persentase kemiskinan yang terjadi di Riau pada Maret 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: **Pertama**, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau pada Februari 2022 adalah sebesar 4,40 persen, terjadi penurunan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 4,96 persen.

Kedua, sempat terjadi peningkatan jumlah pengangguran pada awal-awal merebaknya pandemi COVID-19. Dimana pada Agustus 2019 terdapat 180,66 ribu orang pengangguran, kemudian meningkat menjadi 203,84 ribu orang

pada Agustus 2020. Tetapi seiring dengan berbagai program pemulihan ekonomi yang bergulir, jumlah pengangguran turun menjadi 138,51 ribu orang pada Februari 2022.

Ketiga, Ekonomi Riau triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 naik sebesar 4,88 persen (*y-on-y*), serta ekonomi Riau tahun 2022 (*c-to-c*) tumbuh 4,80 persen.

Keempat, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I dan II 2022 secara berturut-turut tumbuh positif sebesar 5,01 dan 5,15 persen (*y-on-y*), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang tumbuh negatif -2,39 persen, serta konsumsi rumah tangga di Riau periode Januari-Juni 2022 (*c-to-c*) tumbuh 5,08 persen.

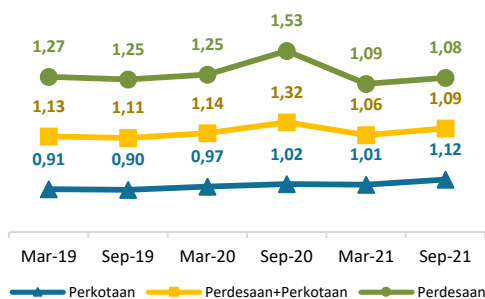


Gambar 26. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi Riau, Maret 2019 – Maret 2022

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, pengaruh dilonggarkannya aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus COVID-10 lebih besar dampaknya terhadap masyarakat perkotaan lebih dibandingkan perdesaan. Hal ini

disebabkan karena di perkotaan perekonomian lebih aktif dibandingkan daerah perdesaan. Pada periode Maret 2021 – Maret 2022, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami fluktuasi, mulai 6,52 persen pada Maret 2021, naik menjadi 6,72 persen pada September 2021, dan turun kembali menjadi 6,34 persen pada Maret 2022. Sedangkan di daerah perdesaan terus turun dari 7,51 persen pada Maret 2021, turun menjadi 7,19 persen pada September 2021 dan turun kembali menjadi 7,08 persen pada Maret 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahannya memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.



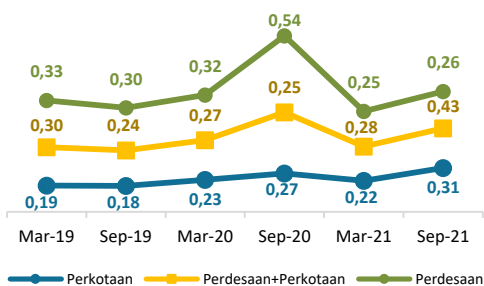
Gambar 27. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Riau, Maret 2019 – Maret 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Riau pada periode Maret 2019-Maret 2020 terlihat mengalami penurunan, sempat mengalami kenaikan pada September 2020 sebesar 1,32, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) turun menjadi 1,09 pada September 2021, tetapi sedikit naik kembali pada Maret 2022 menjadi 1,10. Begitu juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2), mengalami penurunan dari 0,43 pada September 2020 menjadi 0,28 pada September 2021, tetapi naik sedikit pada Maret 2022 menjadi 0,27. Kenaikan sedikit Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) tentu dipengaruhi oleh fluktuasi harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinikmati oleh rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian perkebunan sawit.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di daerah perkotaan Maret 2022 sebesar 0,92, mengalami sedikit penurunan dari Maret 2021 yang tercatat 1,01. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di daerah perdesaan mengalami

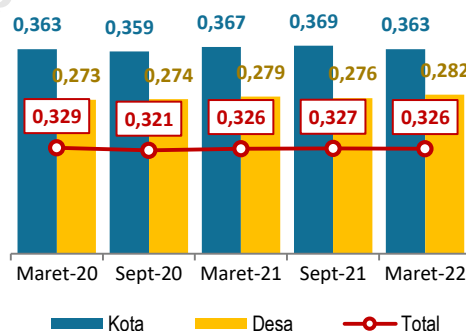
peningkatan dari Maret 2021 yang tercatat 1,09 menjadi 1,21 pada Maret 2022. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan cenderung menjauhi garis kemiskinan pada Maret 2022, sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan justru sebaliknya.

Jika dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂), di daerah perkotaan terlihat sedikit turun dari 0,22 pada Maret 2021 menjadi 0,21 pada Maret 2022. Sebaliknya, di daerah perdesaan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) mengalami kenaikan dari 0,25 pada Maret 2021 menjadi 0,30 pada Maret 2022. Dengan demikian, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di daerah perkotaan relatif mengalami penurunan pada Maret 2022, sedangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di daerah perdesaan relatif mengalami kenaikan di periode tersebut.



Gambar 28. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Provinsi Riau, Maret 2019 – Maret 2022

Perbedaan pendapatan masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan. Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.



Gambar 29. Gini Rasio Menurut Daerah di Provinsi Riau, Maret 2020 – Maret 2022

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Rasio di Provinsi Riau terlihat sedikit naik dari tahun 2020 hingga 2021, tetapi turun sedikit pada Maret 2022. Pada September 2020, Gini Rasio Provinsi Riau sebesar 0,321. Secara perlahan, angka tersebut naik hingga September 2021

berada pada posisi 0,327, dan turun kembali menjadi 0,326 pada Maret 2022. Hal ini menandakan bahwa terjadinya penurunan pendapatan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 terjadi di semua golongan pendapatan rumah tangga, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, sehingga kesenjangan sedikit meningkat.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, dalam periode Maret 2020 – Maret 2022, Gini Rasio di daerah perkotaan

lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Gini Rasio di daerah perkotaan pada Maret 2022 adalah sebesar 0,363, sedangkan Gini Rasio daerah perdesaan sebesar 0,282. Jika dibandingkan dengan Maret 2021, Gini Rasio perkotaan sedikit turun dari 0,367 menjadi 0,363. Sementara itu, Gini Rasio perdesaan sedikit mengalami kenaikan dari 0,279 kondisi Maret 2021 menjadi 0,282 pada Maret 2022.

<https://riau.bps.go.id>

Penjelasan Teknis

PENJELASAN TEKNIS

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI

Kerangka Sampel Area (KSA) didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

1. Sejak 2018, BPS telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode KSA. KSA ini memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari LAPAN

dan digunakan BIG untuk mendelineasi peta lahan baku sawah yang divalidasi dan ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mengestimasi luas panen padi.

2. Penyempurnaan dalam berbagai tahapan penghitungan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif tidak hanya luas lahan baku sawah saja tetapi juga perbaikan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras. Secara garis besar, tahapan dalam penghitungan produksi beras:

- a. Luas lahan baku sawah nasional yang digunakan mengestimasi luas panen yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019 adalah sebesar 7.463.948 hektar dan luas lahan baku sawah Provinsi Riau sebesar 62.689 hektar.
- b. Pengamatan fase tumbuh padi untuk menghitung luas panen dengan KSA yang dikembangkan bersama BPPT dan telah mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Produktivitas per hektar berasal dari Survei Ubinan yang telah dilakukan penyempurnaan dengan mengganti metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi berbasis sampel KSA.

Angka konversi dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras berasal dari Survei Konversi Gabah ke Beras pada tahun 2018 yang merupakan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei di dua periode musim yang berbeda dengan basis provinsi sehingga didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi yang memperhitungkan pengaruh musim.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pengertian Umum:

- NTP merupakan indikator proksi kesejahteraan petani
- NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib)

Arti Angka NTP:

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat

Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang

dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas

- Subsektor Tanaman Pangan, seperti: padi, palawija
- Subsektor Hortikultura, seperti: sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan
- Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antardaerah
- Subsektor Peternakan, seperti: ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Subsektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

Pengumpulan Data Harga

Dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar HKD-1, HKD-2.1, HKD-2.2, HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, HD-5.2, dan HP-6

- Daftar HKD-1 mencatat harga eceran barang kelompok makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga

petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.

- Daftar HKD-2.1 mencatat harga eceran barang/jasa kelompok nonmakanan (dalam hal ini untuk jenis konstruksi, jasa, dan transportasi) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- Daftar HKD-2.2 mencatat harga eceran barang kelompok nonmakanan (dalam hal ini adalah jenis aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- Daftar HD-1 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor tanaman pangan (TP). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian

subsektor tanaman hortikultura. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

- Daftar HD-3 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-4 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor peternakan. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-5.1 dan HD-5.2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor perikanan tangkap dan budidaya. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15

dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

Pemilihan Sampel (Kecamatan)

Dengan rancangan sampling dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama, dari setiap provinsi dipilih secara purposif bersyarat, dipilih sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian,
- Tahap kedua, dari setiap kabupaten terpilih, dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan sentra produksi pertanian.

Pemilihan Pasar

Pemilihan pasar di kecamatan terpilih berdasarkan kriteria:

- Paling besar di kecamatan tersebut
- Beraneka ragam barang yang diperdagangkan
- Kebanyakan masyarakat berbelanja di sana
- Dapat dijamin kelangsungan (kontinuitas) pencatatan harganya

INFLASI

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau

turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sedangkan **Indeks Harga Konsumen (IHK)** adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Indeks Harga Konsumen Indonesia dihitung dengan rumus Laspeyres termodifikasi. Dalam penghitungan rata-rata harga komoditas, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmetik, tetapi untuk beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, bensin, dan sebagainya digunakan rata-rata geometrik.

Mulai Januari 2020, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2018=100 dan mencakup 90 kota yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK

sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012=100 dan hanya mencakup 82 kota.

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari 90 kota, mencakup antara 248-473 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran yaitu: makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Setiap kelompok terdiri dari beberapa subkelompok, dan dalam setiap subkelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Beberapa pasar tradisional, pasar modern, dan outlet di setiap kota dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh melalui wawancara langsung dari 3 atau 4 pedagang eceran, yang didatangi oleh petugas pengumpul data.

Penarikan sampel secara *purposive* digunakan untuk melakukan pemilihan kota, pasar, outlet, responden, komoditas dan kualitas dalam

penghitungan IHK (yang paling dominan).

Frekuensi pengumpulan data harga berbeda antara satu komoditas dan komoditas lainnya, tergantung karakteristik masing-masing komoditas, sebagai berikut:

- Pengumpulan data harga beras dilakukan secara harian di Jakarta, dan mingguan di kota-kota lainnya.
- Beberapa komoditas yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa.
- Untuk beberapa komoditas bahan makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali, hari Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga.
- Untuk komoditas bahan makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis).
- Data harga untuk barang-barang tahan lama dikumpulkan secara bulanan pada hari ke-5 sampai hari ke-15.
- Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

- Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Upah *baby sitter* dan asisten rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

EKSPOR-IMPOR

Perdagangan luar negeri terdiri dari ekspor dan impor barang-barang.

Cakupan Komoditas

Semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk di bawah ini:

- a. Pakaian dan perhiasan dari para penumpang.
- b. Barang bawaan penumpang yang digunakan untuk keperluan sendiri, kecuali lemari es, televisi, dsb.
- c. Barang-barang yang diekspor/diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut.
- d. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekspedisi dan pameran.
- e. Barang-barang yang diekspor/diimpor secara langsung oleh angkatan bersenjata.
- f. Peti kemas yang dimaksudkan untuk diisi.

- g. Catatan-catatan dari bank dan keamanan.
- h. Barang-barang contoh.

Sistem Perdagangan

- a. Statistik ekspor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia.
- b. Statistik Impor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali Zona Perdagangan Bebas dimana berlaku Perdagangan Luar Negeri.

Penilaian

- a. Ekspor mengacu pada nilai *Free On Board* (FOB).
- b. Impor mengacu pada nilai *Cost Insurance and Freight* (CIF).
- c. Keduanya dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat (USD)

Pengukuran Kuantitas

Semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat neto dalam satuan kilogram.

Rekan Negara

- a. Negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.
- b. Negara asal adalah negara dimana barang-barang tersebut diproduksi, setelah diverifikasi oleh Kantor Bea Cukai, sesuai dengan peraturan.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (kategori) yaitu:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan
- Real Estate
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya.

Beberapa kategori di atas ada yang dirinci lagi menjadi subkategori-subkategori.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- pengeluaran konsumsi pemerintah
- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan
- ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa

akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PENDUDUK

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia:

Informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui umur dari responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan ke bawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan, maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

Status Perkawinan:

a. Belum Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.

b. Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk di dalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

c. Cerai Hidup

Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena bercerai dan belum kawin lagi.

d. Cerai Mati

Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Anak Lahir Hidup:

Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memeperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Anak Masih Hidup:

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

Tempat Lahir:

Tempat lahir responden adalah provinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkannya.

Cara Pengumpulan Data Penduduk:

a. Sensus Penduduk

Berdasarkan peraturan perundangan (UU No. 6 Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel.

Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan

keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

b. Survei Penduduk Antar Sensus

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

c. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana, dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancarai untuk tujuan ini.

d. Registrasi Penduduk

Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri) menggunakan pendekatan *de jure*.

TENAGA KERJA

Konsep/Penjelasan Teknis

- 1. Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- 2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- 4. Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- 5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya.

Contoh:

- a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
- c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan, dan sebagainya, seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial, dan sebagainya

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "An ILO Manual on Concepts and Methods")

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang "**baru**" bertujuan untuk memperoleh

penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

- Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

- a. Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b. Pekerja Paruh Waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

- a. Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/ rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- g. Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf

d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

- h. Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- a. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
- b. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia?

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Apa Saja Manfaat IPM?

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Mengapa Metodologi IPM Diubah?

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

PERTAMA

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- PDRB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

KEDUA, penggunaan rumus rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja yang Berubah?

Indikator

- Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode Penghitungan

Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Keunggulan IPM Metode Baru?

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

KEMISKINAN

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Daerah tertinggal (atau kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis kemiskinan makanan

GKNM = Garis Kemiskinan non makanan

Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data

pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Garis kemiskinan dihitung sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan,
2. Mengalikan harga tersebut dengan 2100 yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari,
3. Menghitung nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan,
4. Menghitung proporsi penduduk miskin dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

<https://riau.bps.go.id>

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Riau*. Berita Resmi Statistik No. 06/01/14/Th.XXII. 21 Januari 2022. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2021*. Berita Resmi Statistik No. 59/11/14/Th. XXII. 15 November 2021. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2022. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Februari 2022*. Berita Resmi Statistik No. 26/05/14/Th. XXIII, 9 Mei 2022. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2022. *Luas Panen dan Produksi Padi di Riau 2021 (Angka Tetap)*. Berita Resmi Statistik No.15/03/14/Th. XXII, 15 Maret 2022. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2022. *Luas Panen dan Produksi Padi di Riau 2022 (Angka Sementara)*. Berita Resmi Statistik No.51/10/14/Th. XXIII, 17 Oktober 2022. Pekanbaru: BPS
- _____. 2022. *Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Riau Juni 2022*. Berita Resmi Statistik No. 35/07/14/Th.XXIII. 15 Juli 2022. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan II-2022*. Berita Resmi Statistik No. 41/08/14/Th.XXIII. 5 Agustus 2022. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2022. *Profil Kemiskinan di Provinsi Riau*. Berita Resmi Statistik No.36/07/Th. XXIII, 15 Juli 2022. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2022. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Peduduk Provinsi Riau, Maret 2022*. Berita Resmi Statistik No. 37/07/14/Th. XXIII, 15 Juli 2022. Pekanbaru: BPS.
- bps.go.id. *NTP 2022*. <https://riau.bps.go.id/indicator/22/33/1/inflasi.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2022.
- _____. *Inflasi (Persen), 2022*. <https://riau.bps.go.id/indicator/3/1/1/inflasi.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2022.
- _____. *Ekspor (Milyar US\$), 2022*. <https://riau.bps.go.id/indicator/8/36/1/ekspor.html>. Diakses tanggal 26 Februari 2022.
- _____. *Impor (Juta US\$), 2022*. <https://riau.bps.go.id/indicator/8/39/1/impor.html>. Diakses tanggal 26 Februari 2022.
- idxchannel.com. 2022. 6 Penyebab Harga Minyak Dunia Naik yang Jarang Diketahui Banyak Orang. <https://www.idxchannel.com/economics/6-penyebab-harga-minyak-dunia-naik-yang-jarang-diketahui-banyak-orang>. Diakses tanggal 19 Oktober 2022.
- International Monetary Fund (IMF). 2022. *World Economic Outlook, October 2022: Countering The Cost-Of-Living Crisis*. IMF: New Washington DC. USA.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2022. *Dalam Terpaan Krisis dan Ketidakpastian Global, Kinerja Impresif Ekonomi Jadi Kado Manis Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia*. Siaran Pers HM.4.6/438/SET.M.EKON.3/08/2022. 19 Agustus 2022. Jakarta: Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.

Nainggolan, Edward UP. 2022. *Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global*. Artikel Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Rangga D. Yofa, 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian*. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/08-BBRC-2020-II-2-3-RDY.pdf>. Diakses tanggal 28 Februari 2022.

un.org. 2022. World Economic Situation and Prospects: September 2022 Briefing, No. 164. <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-september-2022-briefing-no-164/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2022.

<https://riau.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.riau.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131

Telp : (0761) 23042, Fax : (0761) 21336

Homepage: <http://www.riau.bps.go.id>, E-mail: bps1400@bps.go.id